

**MANAJEMEN RISIKO KARTU KREDIT SYARIAH
PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU
DALAM PANDANGAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Salah satu syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**



Oleh :

Y U L I A N I
NIM : 10825003455

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru Dalam Pandangan Islam.**

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah salah satu bank yang memiliki produk kartu kredit syariah dengan nama *hasanah card*. Produk kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru dalam pengelolaannya terdapat risiko. Adapun risiko yang paling besar adalah risiko macet dan ketidaktertiban dalam pembayaran. Namun dalam mengatasi risiko tersebut PT. BNI syariah cabang Pekanbaru melakukan penerapan manajemen risiko yaitu jika terjadi keterlambatan pembayaran terhadap kartu kredit maka akan dikenakan denda keterlambatan yaitu dengan menetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*. Jumlah nominal *monthly fee* sebesar 2,95%. Sementara Islam melarang mengambil keuntungan di dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok masalah bagaimana manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI syariah cabang Pekanbaru dalam pandangan Islam, dengan sub masalah yang pertama bagaimana mekanisme kartu kredit syariah (*hasanah card*) pada PT. BNI syariah cabang Pekanbaru, kedua bagaimana penerapan manajemen risiko kartu kredit syariah (*hasanah card*) pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru, serta bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu kredit syariah (*hasanah card*) pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat lapangan yaitu di pekanbaru pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.484 pekanbaru, populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. BNI syariah cabang Pekanbaru yang berjumlah 27 orang. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kartu kredit syariah cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko serta sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.	14
 BAB II GAMBARAN UMUM PT.BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU	
A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. BNI syariah Cabang Pekanbaru.....	17
B. Visi Dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru	20
C. Produk-produk PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.....	20
D. Struktur Organisasi	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO

DAN KARTU KREDIT SYARIAH

A. Manajemen Risiko Pada Bank Syariah	
1. Pengertian Manajemen Risiko Bank Syariah.....	35
2. Tujuan Manajemen Risiko	37
3. Karakter Manajemen Risiko	38
4. Proses Manajemen Risiko	40
B. Kartu Kredit Syariah	
1. Definisi kartu Kredit Syariah.....	42
2. Hukum Kartu Kredit Syariah.....	44
3. Macam-Macam Kartu Kredit.....	46
4. Pihak Yang Terkait Dalam Penggunaan Kartu Kredit ...	47
5. Akad Yang Digunakan Dalam Kartu Kredit Syariah	48
6. Fatwa MUI Tentang Kartu Kredit Syariah	53
C. Manajemen Risiko dalam Islam.....	58

BAB IV MANAJEMEN RISIKO KARTU KREDIT SYARIAH

PADA PT.BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU

DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Mekanisme Kartu Kredit Syariah pada PT. BNI Syariah	
Cabang Pekanbaru.....	62
B. Penerapan Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah Pada	
PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru	64

C. Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah Pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru	68
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disadari atau tidak, zaman sekarang diliputi oleh sistem kapitalisme global. Sistem kapitalisme global ditopang oleh tangan-tangan perusahaan multinasional, dengan sumber daya yang didasarkan atas mekanisme pasar. Jaringan perbankan global adalah jantungnya. Dalam sistem semacam ini, bunga (*interest*) ibarat darahnya perekonomian. Sayangnya sistem kapitalisme berbasis bunga ini ternyata rentan terhadap krisis. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan negara Asia lainnya, telah memporak-porandakan sistem perbankan dan seluruh sendi-sendi perekonomian.

Seiring dengan hal tersebut, perbankan syariah mulai banyak bermunculan dengan produk-produk perbankan yang dikemas secara Syariah.¹ Salah satunya adalah produk yang baru disahkan MUI pada tahun 2006 dan ditunggu-tunggu konsumen muslim Indonesia, yaitu: kartu kredit syariah. Inilah kartu kredit yang bersandar pada prinsip-prinsip syariah alias non-riba.²

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai.³

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. Keenam, h. 179

² <http://www.bni.co.id/Syariah/BNIHasanahCard/tabid/376/Depault.aspx>

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan ke kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Edisi Kelima, h. 633

Kartu kredit syariah pertama di dunia diluncurkan oleh AmBank Malaysia (semula dikenal Arab-Bank Malaysian Bank Berhad) dengan nama *Al-Taslif Credit Card* pada tahun 1996 dengan skema *bai bitsaman ajil* (jual beli dengan bayar tangguh). Meski menimbulkan pro dan kontra, langkah tersebut diikuti oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pertengahan tahun 2002 dengan nama Bank Islam Card dan Arab Banking Corporation (ABC) Islamic Bank Bahrain pada akhir 2002, serta As Shamil Bank dan Tadamon Islamic Bank. Namun perkembangan kartu kredit syariah di Malaysia kurang menggembirakan.⁴

Transaksi mendunia tanpa uang tunai mulai menjadi *trend* sejak ditemukannya kartu plastik (*plastic card*) atau kartu pintar (*smart card*) seiring perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang mulai meninggalkan kebiasaan memakai uang tunai (*cashless society*). Walaupun secara realita kondisi di Indonesia masih didominasi masyarakat yang tergolong *cash based society* atau lebih suka menggunakan uang tunai, namun bisnis kartu kredit yang kian marak ternyata juga menggoda sebagian pelaku perbankan syariah. Meski menimbulkan pro dan kontra di tengah hiruk pikuknya dunia konsumtif, kredit macet dan beban hutang berkelanjutan, kalangan perbankan syariah akhirnya memberanikan diri meluncurkan kartu kredit syariah.

Saat ini di Indonesia terdapat 21 perusahaan penerbit kartu kredit dengan rincian 18 bank dan 3 lembaga keuangan bukan bank. Jumlah kartu kredit yang

⁴Dikutip dari <http://www.google>

beredar saat ini berjumlah 5,5 juta kartu dengan total transaksi Rp. 10-14 triliun pertahun, sebanyak 80 persen pengguna kartu kredit tersebut adalah muslim.⁵

Sekarang ini banyak terdapat berbagai bentuk kartu kredit, diantaranya ada yang berlaku secara lokal dan ada juga yang berlaku secara internasional.⁶ Kartu kredit banyak tersedia dan digunakan terutama oleh mereka yang berkategori menengah ke atas, meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. Sehingga akhirnya hal itu memunculkan beragam masalah yang justru menyulitkan si pengguna. Ini setidaknya terlihat dari problem kredit macet yang dihadapi kalangan perbankan akibat ulah pemilik kartu kredit. Kredit macet sering terjadi akibat seleksi pemegang kartu yang tidak ketat.⁷

Setiap orang dapat memegang banyak kartu, tetapi kredibilitasnya tidak ada. Banyak pemegang kartu tidak dicek, rumah yang dimilikinya apakah rumah sendiri atau kontrak. Siapa saja yang ingin memiliki kartu kredit akan diberi karena berlomba-lomba mengejar kuantitas dengan mengejar target sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek risiko. Penyebab yang lain adalah tidak ada *sharing* informasi di antara penerbit mengenai orang-orang bermasalah dengan kartu kreditnya.⁸

Mengenai konsumerisme nasabah dengan adanya kartu kredit ini, diakui tidak mungkin terhapus seluruhnya. Kerawanan kartu kredit terletak pada pembebanan bunga jika pemegang kartu tak mampu membayar pada saat jatuh

⁵ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and Sharia System"*. Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 1361

⁶ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, "*Banking Cards Syariah*." Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 45

⁷ Veithzal Rivai, *op.cit.*, hal. 1362

⁸ *Ibid.*

tempo, sehingga menimbulkan penggandaan bunga yang berlipat dan terpuruk dalam perangkap kapitalisme global. Apalagi banyak di antara mereka yang tidak melunasi ketika tagihan jatuh tempo.

Proses pembuatan kartu kredit syariah juga masih mengalami banyak kendala di antaranya dalam hal penetapan harga jual, karena harga pada akad jual beli ditentukan di awal sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Sedangkan harga tangguh suatu barang dan jasa pada kartu kredit bisa berubah akibat semakin lamanya pembayaran, sehingga akan sulit menentukan harga jual yang akurat.⁹ Selain itu, tidak ada jaminan keabsahan berbagai item transaksi barang dan jasa yang menyangkut perbedaan akad, termasuk mendeteksi transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah.

Salah satu Bank Syariah yang ada di Pekanbaru yang telah memiliki produk kartu kredit syariah adalah BNI Syariah. Kehadiran BNI Syariah di Pekanbaru diharapkan mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa daerah, salah satunya dengan mengelola kartu kredit syariah (*hasanah card*). Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs Tanggal 11-03-2008. Sesuai dengan DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 *syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Hasanah Card adalah kartu berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat yang bertanda *mastercard* dan semua

⁹ http://www.google.co.id/info/perbankan_dan_ekonomi_syariah.

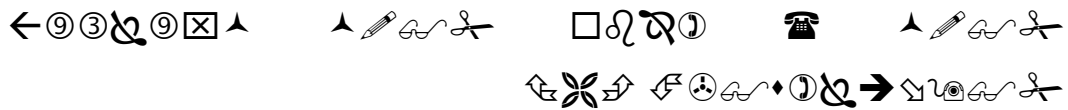
ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. Adapun keunggulan dari *Hasanah Card*:

1. Sesuai syariah.
2. Dapat diterima ribuan *merchant mastercard* di seluruh dunia.
3. Lebih ringan (tidak bunga-berbunga), dan fee hanya dikenakan atas sisa kewajiban.
4. Meminimalisir transaksi yang tidak sesuai syariah.
5. Fitur lengkap: *transfer balance, smartbill, smart spending*, dana plus, *executive airport Longe (type Gold dan Platinum)*

Adapun akad yang digunakan dalam pengelolaan kartu kredit syariah (*Hasanah Card*) pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru yaitu:

1. Akad *kafalah* yaitu penjamin bagi pemegang *Hasanah Card* terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang *Hasanah Card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai. Atas pemberian *kafalah*, BNI dapat menerima *monthlymembership fee*.
2. Akad *qardh* yaitu BNI adalah pemberi pinjaman kepada pemegang *Hasanah Card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.
3. Akad *ijarah* yaitu BNI adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *Hasanah Card*. Atas *ijarah* ini, pemegang *Hasanah Card* dikenakan *annual membership fee*.¹⁰

¹⁰ Brosur .BNI Hasanah card



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹²

Dalam pelaksanaannya ternyata juga terdapat kemungkinan-kemungkinan risiko terhadap penerbitan kartu kredit syariah tersebut. Salah satunya adalah kemungkinan keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Hal ini juga dialami oleh PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru. Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru dalam menangani pembiayaan bermasalah (kartu credit macet) yaitu dengan mengenakan denda keterlambatan yaitu menetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*. Tujuannya adalah untuk melakukan ekuivalent biaya riil yang dibebankan kepada pemegang kartu hasanah, yang disebut *net monthly fee*. dimana semua limit kartu mulai dari terkecil sampai dengan yang terbesar diperbandingkan dengan *monthly fee* masing-masing limit kartu, mempunyai equivalent yang sama yaitu sebesar 2,95%.¹³

¹² Al-Maidah (5):2

¹³ <http://kartu.hasanah.blogspot.com>

Bank syariah, sebagaimana halnya BNI Syariah cabang Pekanbaru, akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Untuk itu jelas dibutuhkan manajemen risiko. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Adapun proses manajemen risiko operasional bank Islam meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.¹⁴ Hal ini semestinya juga di lakukan oleh PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru, di samping manajemen risiko tersebut juga mesti sesuai dengan syariat Islam.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada kartu hasanah, maka akan dikenakan denda keterlambatan. Adapun denda keterlambatan pada kartu hasanah telah ditetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*. Di mana semua limit kartu di perbandingkan dengan *monthly fee* masing-masing limit kartu mempunyai equivalent yang sama yaitu sebesar 2,95%. Biaya riil yang dikenakan kepada card holder yang disebut dengan *net monthly fee*.

$$\text{Net Monthly Fee} = \text{OutStanding (sisa hutang yang belum dilunasi)} \times (\text{monthly Fee} : \text{Limit Kartu})$$

Contoh kasus

Limit kartu Gold Rp.10 Juta, dimana *monthly fee* nya Rp 295.000,-.

¹⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)), Edisi Ketiga, h. 255.

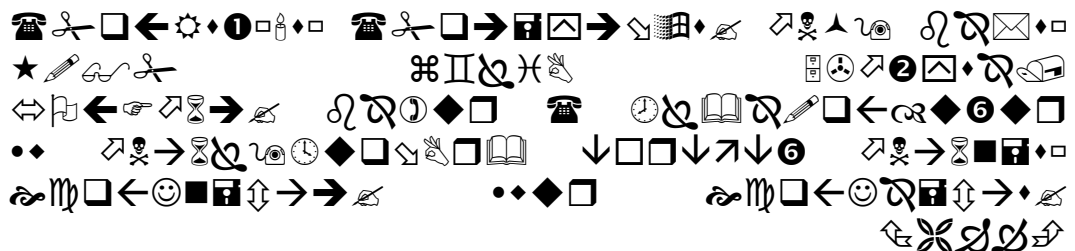
Tanggal 1 juli melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1juta, di mana ditagih pada tanggal 18 Juli dan jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2010, di mana pada tanggal 5 Agustus 2010 melakukan pembayaran sebesar Rp 500 Ribu, maka *outstanding* (sisa hutang yang belum dibayar) adalah Rp 500.000,-.

Net monthly fee=*outstanding* X (*monthly fee*/limit kartu)

Rp 500.000,- X (Rp295.000,-/Rp 10.000.000,-)

Net monthly fee = Rp 14.750, jadi biaya keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 14.750,-

Hal di atas menimbulkan banyak pertanyaan, di antaranya adalah apakah itu dibolehkan dalam Islam? Sementara Islam melarang mengambil keuntungan di dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279:



*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*¹⁵

Berdasarkan penjelasan proses manajemen risiko operasional bank Islam di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme manajemen risiko pada PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru, apakah telah sesuai

¹⁵ Al- baqarah (2): 279

dengan manajemen risiko operasional syariah. Karena itu dilakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam Pandangan Islam”**

Dijadikannya PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru sebagai sasaran penelitian, karena ia merupakan satu-satunya bank syariah yang ada di Pekanbaru yang memiliki produk kartu kredit syariah. Sementara Pekanbaru sendiri merupakan kota yang berkembang pesat dan mayoritas penduduknya muslim. Kartu kredit syariah yang dimiliki oleh BNI syariah cabang Pekanbaru jelas akan menghadapi kemungkinan berbagai risiko. Inilah yang menjadi alasan penelitian masalah ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan suatu penelitian dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru dalam mengelola kartu kredit Syariah?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru?

C. Batasan Masalah

Karena luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi tulisan ini tentang manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI syariah cabang Pekanbaru dalam pandangan Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru dalam mengelola kartu kredit Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru.

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang mekanisme kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman tentang penerapan manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru dalam mengelola kartu kredit Syariah
3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.484

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dari penelitian ini karyawan dan pimpinan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah manajemen risiko kartu kredit Syariah (*Hasanah card*) pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam pandangan Islam.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang berjumlah 27 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Adapun bagian kartu kredit yang berjumlah 3 orang selainnya menjadi data sekunder.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi, buku-buku referensi dan literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu suatu metode yang melakukan komunikasi langsung kepada responden guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi responden adalah pimpinan dan karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Observasi yaitu suatu teknik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif,¹⁷ yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan, kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai

¹⁶ Soehadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, (Yogyakarta: Lukman offset, 1999), hal. 59

¹⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 136-137.

langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami hasil penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan ke lima bab tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Dalam bab ini secara umum dibicarakan tentang kartu kredit syariah dan kemungkinan risikonya pada PT.BNI syariah cabang Pekanbaru. PT.BNI Syariah cabang Pekanbaru ini akan dibicarakan pada Bab II.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya PT. BNI Syariah, visi dan misi PT. BNI syariah cabang pekanbaru, produk-produk PT. BNI syariah cabang pekanbaru dan struktur organisasi. sebagaimana dibicarakan pada Bab I BNI Syariah cabang Pekanbaru ini memiliki produk kartu kredit syariah dengan segala kemungkinan risikonya. Ia membutuhkan manajemen risiko kartu kredit syariah yang secara umum akan dibicarakan pada Bab III.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DAN KARTU KREDIT SYARIAH

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa teori yang *pertama* yaitu: manajemen risiko pada bank syariah yang terdiri dari pengertian manajemen risiko bank syariah, tujuan manajemen risiko, karakter manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Ke dua yaitu: kartu kredit syariah yang terdiri dari definisi kartu kredit syariah, macam-macam kartu kredit syariah, pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit syariah, akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah, Fatwa MUI tentang kartu syariah dan manajemen risiko dalam Islam. secara umum. Manajemen risiko ini juga dibutuhkan PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Bagaimana manajemen risiko kartu kredit pada bank tersebut dan bagaimana Islam memandangnya, akan dibicarakan pada bab IV.

BAB IV: PANDANGAN ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang mekanisme kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru, penerapan manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru dalam mengelola kartu kredit Syariah dan pandangan

Islam terhadap maajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI
Syariah Cabang Pekanbaru

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru

PT. BNI Syariah termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya bank-bank syari'ah di Indonesia, karena PT. BNI Syariah merupakan bank besar yang pertama membuka unit syariah. Pada awal Maret tahun 2000 dibuka tim proyek cabang syari'ah dengan tujuan untuk memperluas segmen pasar.

Berdasarkan hasil keputusan Direksi Tanggal 18 April 2005 dan surat keputusan Direksi No.KP/712/DIR/R tanggal 26 April 2005 maka telah ditetapkan sistem manajemen BNI Syariah yang didesain secara berbeda dengan unit-unit bisnis yang ada di BNI. Secara umum sistem manajemen BNI Syariah dalam kerangka otonomi khusus terdiri atas pemimpin divisi dan wakil pemimpin divisi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Bisnis Syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi "*universal banking*", BNI menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan Bank Syariah Indonesia. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan sistem dual banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.¹

Pada tanggal 29 April 2000 dibuka lima cabang perdana. Saat ini telah terdapat 2 cabang syariah prima, dan 12 cabang reguler serta 14 kantor cabang

pembantu syariah (KCPS), tanggal 8 Juli 2002 sejalan dengan peningkatan *load busseness*, organisasi unit usaha syariah ditingkatkan menjadi Divisi Usaha Syariah (USY). Pada bulan November 2003 BNI Syariah mendapat penghargaan sebagai “*The Most Profitable Islamic Bank*” dari Bank Indonesia berkat kinerja PT. BNI Syariah selama tahun 2003.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha BNI. Setelah itu BNI menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, antara lain sebagai berikut :

- a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka 5 kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
- b. Tahun 2001 BNI membuka 5 kantor Cabang Syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia yakni : Jakarta (dua cabang), Bandung, Makasar dan Padang.
- c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan Syariah, tahun 2002 lalu BNI membuka 2 kantor cabang Syariah baru di Medan dan di Palembang.
- d. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan *loan* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, BNI merekolasi kantor cabang Syariah dari Jepara ke Semarang. Sedangkan

untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.

- e. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.
- f. Pada bulan Juni dan Juli 2005, BNI Syariah membuka kantor Cabang Syariah Cirebon dan Pekanbaru dilanjutkan dengan pembukaan Cabang Syariah Bogor dan Surakarta pada bulan November 2005.
- g. Pada bulan Desember 2005, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Syariah Balikpapan.
- h. Pada September 2006, berturut-turut BNI Syariah membuka Kantor Cabang di Jakarta Utara, dan Tanjung Karang, Lampung.

Pembukaan kantor cabang PT. BNI Syariah di Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 21 juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan. Kantor cabang ini merupakan outlet ke-31 yang dimiliki BNI Syariah dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan membuka kantor cabang di kota-kota lainnya. Acara pembukaan kantor BNI Syariah Cabang Pekanbaru ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor baru BNI cabang Pasar Pusat Pekanbaru yang dihadiri oleh Gubernur Riau Rusli Zainal, Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah, Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh Masyarakat dan pemuka Agama Riau.

BNI Syariah siap memasuki pasar, awal 2010. Unit syariah Bank BNI, resmi melakukan pemisahan (*spin off*) dari induknya. Para pemegang saham dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI Syariah itu menjadi bank umum murni syariah.

Saat ini asset Bank BNI Syariah sebesar Rp. 4 triliun lebih. Dengan posisi itu, unit syariah BNI ini berada pada peringkat ke tiga dari 30 unit syariah, setelah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. BNI Syariah juga memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama.

B. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Visi PT. BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga *insyaallah* membawa berkah. Sedangkan Misi BNI Syariah adalah secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

C. Produk-Produk PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru

1. Penghimpunan Dana

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah di dalam bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi:

a. Tabungan Syariah Plus

Merupakan simpanan dana rupiah perorangan dalam rekening buku tabungan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu dengan memakai slip setoran, pengambilan dan kwintansi.

b. BNI Tapenas Syariah

Merupakan investasi dana sesuai syariah dalam rangka merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Selain dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, BNI Tapenas Syariah diperuntukkan juga sebagai tabungan perencanaan umrah dan tabungan perencanaan pernikahan. Dengan bagi hasil kompetitif dan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa dan asuransi otomatis bebas premi dengan manfaat asuransi hingga Rp. 750 juta.²

c. THI Syari'ah

Tabungan Haji Indonesia (THI) adalah bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan haji sesuai keinginan penabung. Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji NO. D/146 tahun 1998 tanggal 13 Juli 1998. Keunggulan dari THI Syari'ah ini yaitu: bebas biaya administrasi, biaya pembukaan rekening, biaya pengelolaan rekening maupun biaya penutupan rekening.

d. Giro Syari'ah

Merupakan titipan dana dengan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* di mana merupakan titipan dana murni yang dengan seizin

² Brosur Produk BNI Tapenas Syariah

dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan media cek atau bilyet giro) dengan setoran pertama sebesar Rp. 1.000.000,- untuk nasabah perusahaan dan Rp. 500.000,- untuk nasabah perorangan.³

e. Deposito Syari'ah

Merupakan dana rupiah dalam rekening yang dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu dan Bank memberikan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Deposito Syari'ah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.⁴

2. Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank BNI Syari'ah cabang Pekanbaru sebagai berikut:

a. Pembiayaan Produktif Syari'ah

Memberikan pembiayaan bagi usaha produktif nasabah

b. Pembiayaan Personal Syari'ah

Menggunakan prinsip *murabahah*, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan pembayaran dilakukan mencicil.

³ Brosur Produk Giro Syariah PT. BNI Syariah. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara sohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Lihat, buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.97

⁴ Brosur Produk Deposito Syariah

c. BNI iB Oto

Memberikan pembiayaan kendaraan baru dan bekas dengan lebih adil dengan prinsip jual beli (*murabahah*), selama pembiayaan angsurannya tetap dan tidak berubah sampai lunas.⁵

d. BNI Griya Syariah

Dengan prinsip *murabahah*, BNI Griya Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan rumah, kavling atau untuk renovasi rumah yang lebih adil. Selama masa pembiayaan, angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.⁶

e. BNI Wirausaha Syariah

BNI Wirausaha Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan syariah. Jenis akad yang digunakan dapat berupa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.⁷

f. *Qardhul Hasan*

Pinjaman murni yang diperuntukkan bagi karyawan PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru sendiri dan bagi pengusaha kecil. Dana *qardhul hasan* berasal dari zakat, infaq, dan shodaqah serta pendapatan non halal.⁸

⁵ Brosur Produk BNI iB Oto

⁶ Brosur Produk BNI Griya Syariah

⁷ Brosur Produk BNI Wirausaha Syariah

⁸ Ade Eka Syaputra, (Pengelola Pemasaran), Karyawan PT. BNI syariah Cabang Pekanbaru, *Wawancara* di Pekanbaru tanggal 13 Juli 2011.

3. Fasilitas Jasa

Adapun fasilitas yang disediakan oleh bank BNI Syari'ah cabang Pekanbaru antara lain sebagai berikut :

- a. Kiriman Uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari satu cabang ke cabang lainnya atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain berdasarkan prinsip *al-wakalah*.⁹
- b. Kiriman Uang dari cabang Syari'ah ke BNI konvensional atau sebaliknya dapat dilakukan secara *interbranch*, pelaksanaannya agar dilakukan pada saat sistem BOSS dalam keadaan *on line*. Hal ini untuk menghindari terjadinya DPT, mengingat hubungan antara cabang-cabang Syari'ah dengan BNI konvensional diselesaikan melalui rekening USY yang ada di cabang Jakarta Pusat.
- c. Inkaso, adalah pengiriman uang atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut dengan prinsip *al-wakalah*.
- d. Kliring, adalah suatu tata cara perhitungan penagihan surat-surat berharga dari satu bank peserta kliring terhadap bank peserta lainnya agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah aman serta dapat memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dengan prinsip *al-wakalah*.

⁹ *Al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Lihat, buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 120

- e. Layanan *Phoneplus*, adalah layanan transaksi perbankan melalui telepon 24 jam dalam mendapatkan segala informasi produk dan jasa BNI dan dapat melakukan transaksi perbankan dengan jaminan privasi yang tinggi serta tidak dibatasi ruang, waktu dan gerak.
- f. ATM BNI, ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah mesin anjungan tunai mandiri yang ditempatkan di cabang BNI atau BNI Syari'ah dan tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah tertentu dengan melayani diri sendiri dan menggunakan kartu Syari'ah plus dan kartu Syari'ah Prima untuk mengambil uang tunai di seluruh ATM BNI.
- g. Sukuk Negara Ritel, surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga Syari'ah negara yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual dan diterbitkan tanpa warkat.
- h. Wakaf uang, merupakan inspirasi kesejahteraan masyarakat dan investasi akhirat. Berapapun nominalnya dapat diwakafkan, namun jika ingin mendapatkan sertifikat wakaf uang dapat diperoleh dengan menyetor minimal Rp. 1.000.000,- untuk wakaf abadi dan Rp. 10.000.000,- untuk wakaf berjangka.¹⁰
- i. Gadai Emas BNI Syariah, merupakan pilihan tepat untuk menitipkan perhiasan emas dengan lebih murah karena tarif jasa penyimpanan

¹⁰ Brosur Produk Wakaf Uang.

dihitung secara harian, proses dan persyaratan sangat sederhana serta dikelola secara syariah.¹¹

j. BNI Hasanah Card

Merupakan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat digunakan di merchant-merchant yang bekerja sama dengan PT. BNI Syariah.

BNI syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card tidak secara muda dapat langsung memberikannya kepada nasabah, mereka menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Antara lain adalah harus berusia minum 21 tahun, memiliki karu identitas diri, melampirkan buku penghasilan, serta untuk lebih mempermudah disetujui permohonan tersebut bagi pemohon yang telah memiliki kartu kredit lainnya dapat melampirkan fotokopi karu kredit tersebut sebagai referensi.

BNI Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Gold	Rp.60 juta/bulan	Usia min. 21 thn, mak. 25 tahun.	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn.
Hasanah Classic	Rp.25 juta/bulan	Usia min. 21 thn, mak. 25 tahun.	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn.

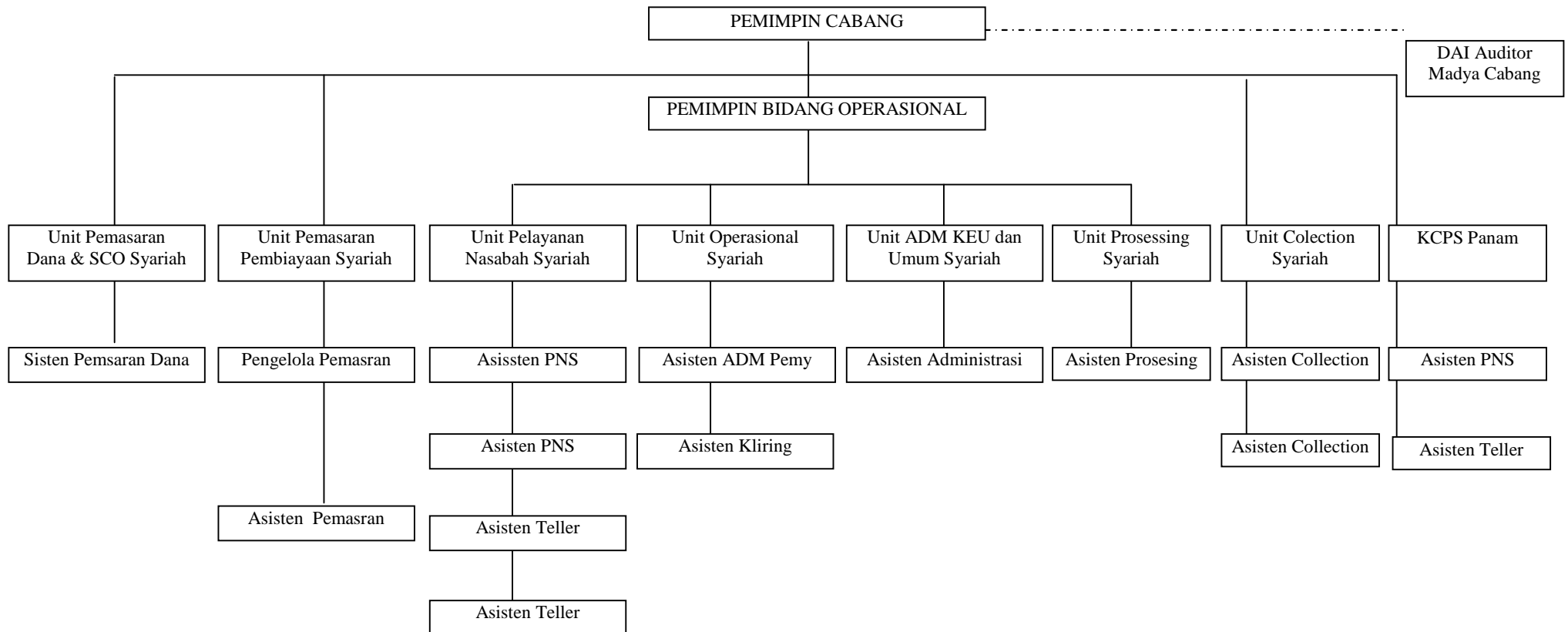
Bagi nasabah *Hasanah Card* kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,-/tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan *finansial* nasabah. Syarat ini tidak memberikan

¹¹ Brosur Produk Gadai Emas Syariah.

peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki *hasanah card* adalah kalangan menengah keatas yang penghasilannya minimal Rp. 2.000.000,-¹²

¹² Brosur Aplikasi Hasanah card

D. Struktur Organisasi



Pembagian kerja

Pemimpin Cabang:

1. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).
2. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
3. Menetapkan kebijakan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
6. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
7. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan korelasi bila diperlukan.
8. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan konsumtif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.

Pimpinan Bidang Operasional

1. Melakukan supervisi dan koordinasi subordinasi di bawah.
2. Berusaha menekan biaya operasi kantor cabang seefisien dan seefektif mungkin.

3. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi serta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
4. Memonitor transaksi harian dan memberikan masukan kepada bagian yang terkait.¹³

Bagian Layanan dan Kas

1. Unit Pelayanan Nasabah
 - a. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
 - b. Mengelola dan mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai dengan prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.
2. Asisten Rekening dan Jasa Kasa dan Teller
 - a. Menerima pembukaan rekening tabungan, giro, deposito dan tabungan haji.
 - b. Mengusahakan kegiatan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Menerima dan membayar uang tunai, baik berupa cek/bileyet giro dari nasabah dan pihak lain setelah memastikan kebenarannya.
 - d. Menyimpan dan memelihara dana tunai selama jam operasi, kas dan sesudahnya.

¹³ Fery Eko C, (Pimpinan Bidang Operasional), *wawancara*, tanggal 17 Juli 2011 di Pekanbaru.

- e. Menyimpan informasi, mengenai data-data nasabah bagi pihak yang tidak berkepentingan.
- f. Menyerahkan kepada kepala seksi dana (uang tunai) yang melebihi batas simpanan yang diperbolehkan.

Bagian Operasional

1. Memeriksa dan memastikan bahwa kebersihan dan keamanan gedung dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.
2. Memonitor semua investaris kantor dan memastikan kelayakan pakai atas investaris tersebut.
3. Semua bagian yang petugas mensupport semua kegiatan operasional bank yang diberikan oleh atasan bank langsung sepanjang masih dalam ruang lingkup dan fungsi sarana dan logistik.
4. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk pengadaan ATK dan barang cetak.
5. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga di harapkan tetap di bawah limit.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam lingkup dan fungsi pelaksanaan kliring.
7. Memastikan semua anggota Satpam, Supir dan Clening Service hadir tetap waktu serta memeriksa dalam buku hadir.
8. Senantiasa memonitor pembebasan dari kantor pusat dan cabang lain atas biaya-biaya yang timbul dan meresponnya segera.

9. Melaksanakan *up date* persediaan materi, perangko, cek, BG, sehingga tidak akan kehabisan stok khusus untuk komoditi tersebut.

Unit Pemasaran Syari'ah

1. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.
2. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.
3. Mengawasi penggunaan kredit mengikuti perkembangan perusahaan nasabah.
4. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun tulisan.
5. Melakukan usaha pengalihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara musyawarah maupun melalui badan penyelesaian sengketa (BPS).
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang.
7. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Pengelola Pembiayaan

1. Menyimpan file surat-surat keluar untuk kepentingan dalam operasi pembiayaan.
2. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pembiayaan, sebagaimana telah ditetapkan.
3. Secara aktif melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran dan akad.
4. Melakukan pemeriksaan atas dasar persyaratan-persyaratan atau rekomendasi pada komite pembiayaan, serta memproses droping credit, bank garansi, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Bagian Keuangan dan Umum

1. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan data payroll (BUMT, hak cuti, lembur dll) serta perubahan data karyawan, terutama yang berhubungan dengan personil file.
2. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta kerapian dokumen transaksi harian tersebut.
3. Memfile surat, memo keluar dan masuk.
4. Melaksanakan tugas rekrutmen apabila dibutuhkan penambahan karyawan.
5. Mengurus pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 karyawan ke kantor pelayanan pajak.
6. Memelihara dan menjaga kerahasiaan perusahaan dan karyawan.
7. Melaksanakan interuksi lain dari atasan dengan baik.
8. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal reimbursment kesehatan, uang makan, transportasi lembur.
9. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti regular maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak mengganggu aktivitas kantor.
10. Melayani perjalanan dinas karyawan dan hal yang berhubungan dengan biaya perjalanan dinas karyawan.

11. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan biliyet giro (BG) yang di minta bagian customer sevice (CS).
12. Melakukan *cesh count petty cash* dan pemeriksaan rutin materi sampai sebulan sekali.
13. Melakukan *cash count* terhadap uang tunai yang berada di teller maupun di kahasanah minimal sebulan sekali.
14. Mengadministarsikan statement rekening giro nasabah dan memantu pengirimannya serta me-*review* dokunem-dokunem yang kembali ke bank.
15. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung pencapain target bank BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DAN KARTU KREDIT SYARIAH

A. Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Risiko Bank Syariah

Manajemen merupakan kata kunci dalam mencapai keberhasilan suatu usaha. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Ada beberapa manajemen yang melekat pada setiap dunia usaha, termasuk manajemen risiko. Istilah risiko biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang secara intuitif sudah dipahami apa yang dimaksudkan.¹ Namun secara ilmiah, pengertian risiko sampai saat ini masih beragam, antara lain:

- a. Menurut H. Abbas Salim di dalam bukunya “Asuransi dan Manajemen Risiko” Risiko adalah ketidak pastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.²
- b. Menurut Muhammad Ma'sum Billah, risiko diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan, di mana kerugian tersebut ditanggung oleh pihak asuransi.³

¹ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), Cet.1,h.1

² H.Abas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-1, h.75

³ M Ma'sum Billah, *Principle and Prapicle of Takaful and Insurance*, (Malaysia: International Islami University Malaysia, 2001), Cet. Ke-1, h. 95

- c. Ferdinand Silalahi mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan risiko adalah probabilitas atau hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan.⁴
- d. Menurut Ferry N.Idroes di dalam bukunya “ *Manajemen Risiko Perbankan*” risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Bab I Pasal 1 butir 3 dijelaskan bahwa:

*“Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengatur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.”*⁶

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁷ Menurut Agus Sugiarto, ketua Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu pedoman yang bersifat kehati-hatian (*Prudential*) yang mutlak

⁴ Ferdinand Silalahi *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), Cet. Ke-1, h.80

⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.4

⁶ www.lontar.ui.ac.id/flie?file=digital/131002...penerapan%20kartu

⁷ Ferry N. Idroes, *op.cit.*, h.5

dimiliki dan dilaksanakan bagi semua bank.⁸ Menurut Zainul Arifin, manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk *risk assesment*, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan control risiko.⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami esensi dari manajemen risiko yaitu bagaimana mengelola risiko agar tidak melampaui tingkat yang tidak dapat ditolerir yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha bank sehingga menjadi suatu probabilitas dalam meraih keuntungan.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko/pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar untuk dapat memperkirakan bahaya yang akan menimpa dengan perhitungan yang akurat yang berdasarkan kepada berbagai analisis terhadap berbagai variabel kemungkinan terjadinya risiko dengan pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu kerugian.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai

⁸ Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam al Quran*, (Jakarta: PT. Visi Cita Kreasi, 2007), h.413

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Kata Pengantar Syafi'i Antonio, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h.252

filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable* (tidak dapat diterima)
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat yang *uncontrolled* (tak terkendalikan).
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹⁰

3. Karakter Manajemen risiko

a. Identifikasi Risiko

Manajemen yang dilakukan dalam Bank Islam antara lain:

- 1) Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi produk.
- 2) Proses manajemen. Keunikan bank syariah dalam proses manajemen terlihat pada system dan prosedur operasional akuntansi dan *chart of Account (CoA)*, system dan prosedur operasional teknologi infotmasi, system dan prosedur operasional tutup buku, serta system dan prosedur operasional pengembangan produk.

¹⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.255

- 3) Sumberdaya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat dalam spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- 4) Teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada *Business requirement sfesification* (BRS) untuk pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan *business requiment sfesification* (BRS) dana pihak ketiga.
- 5) Lingkungan eksternal. Keunikan bank syariah dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dualregulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah nasional.
- 6) Kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek *ijarah*.¹¹

b. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact* atau yang biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.¹²

c. Antisipasi Risiko

Antisipasi ini bertujuan untuk:

1) Preventive

Dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan dewan pengawas syariah untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek

¹¹ *Ibid.*, h.256

¹² *Ibid.*, 257

syariah. Di samping itu, bank Islam juga memerlukan opini bahwa fatwa dewan syariah nasional bila Bank Indonesia memadai atau berada di luar kewenangannya.

2) *Detective*

Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh dewan pengawas syariah. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.

3) *Recovery*

Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4) Monitoring risiko

Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan DPS.¹³

4. Proses Manajemen Risiko

Karena perbedaan kondisi pasar dan struktur bank (cakupan usaha), tidak mudah untuk menetapkan satu system *risk manajemen* yang dapat berlaku umum. Maka masing-masing bank perlu merancang dan menyusun program pengendalian risikonya sendiri sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisinya. Namun demikian, secara umum sistem manajemen risiko yang efektif haruslah independen dari semua aktivitas pengambilan risiko. System manajemen risiko yang efektif haruslah mencakup beberapa proses sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, h.258

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - 2) Penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha , produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko.
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, factor risiko, teknologi informasi dan system informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* h.259

B. Kartu Kredit Syariah

1. Definisi Kartu Kredit Syariah

Bila kita merujuk kepada kamus bahasa inggris maka kartu kredit memiliki beberapa makna: biasanya dipakai untuk kemuliaan, dan kepercayaan seseorang; pengakuan terhadap integritas seseorang; reputasinya yang baik; terpercaya dan mulia.¹⁵

Dalam fiqih muamalah, kartu kredit “*bithaqah i’timan*” biasa disebut “*bithlaqah iati’man*” artinya adalah memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.¹⁶

Sementara dalam Kamus Ekonomi Arab dijelaskan bahwa sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian.¹⁷

Menurut *al-Majma’ al-Fiqhiy al Islamiy*, sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak-

¹⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), ed.1 h.1

¹⁶ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Muamalah Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 122

¹⁷ Ahmad Zaki Badwi, *Kamus Ekonomi Arab*, (Yogyakarta:Pustaka Wdyatama,2006), h.62

pihak yang mengikuti fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya.¹⁸

Kartu kredit, yaitu uang plastik atau suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.¹⁹

Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diataur dalam fatwa.²⁰

Kartu kredit ini berbentuk kartu persegi panjang di mana tertera nama bank penerbit, nomor, dan nama pemegang kartu, tanggal dan tahun berlakunya, gambar serta logo visa, dan logo huruf C untuk kartu classic atau logo huruf p untuk kartu Gold atau primer atau platinum.

Secara umum perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah sebagai berikut:

¹⁸ <http://ahlussunnah.info/blog/2010/07/08/artikel-ke-75-kartu-kredit>.

¹⁹ Veitrizal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and sharia system"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1,h.1363

²⁰ <http://luqmannomic.wordpress.com/2008/12/21/kartu-kredit-syariahkah/>

No	Keterangan	Syariah	Konvensional
1.	Biaya yang dikenakan	<i>Annual membership fee</i> atau iuran tahunan dan <i>monthly membership fee</i> atau iuran bulanan atas keterlambatan pembayaran.	<i>Annual membership fee</i> atau iuran tahunan dan bunga atas keterlambatan pembayaran
2.	Biaya penarikan tunai	Biaya administrasi	Bunga 2% sampai 4% per bulan Diberlakukan
3.	Perlakuan pengenaan denda	Diberlakukan sebagai dana social.	sebagai pendapatan bank
4.	Pembatasan dalam penggunaan	Tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai syariah	Nasabah boleh sesuka hati melakukan pembelanjaan termasuk belanja barang yang non halal

2. Hukum Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X72006, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dimaksud dengan kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hokum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini. Penerbitan kartu kredit syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu:

- a. Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas dunia perbankan syariah juga semakin meningkat. Oleh karena itu perbankan syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah

bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan syariah-syariah yang ada.

- b. Melihat kondisi yang ada, diimana system kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- c. Adanya kartu kredit syariah menjadi alternative yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Bergama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga.²¹

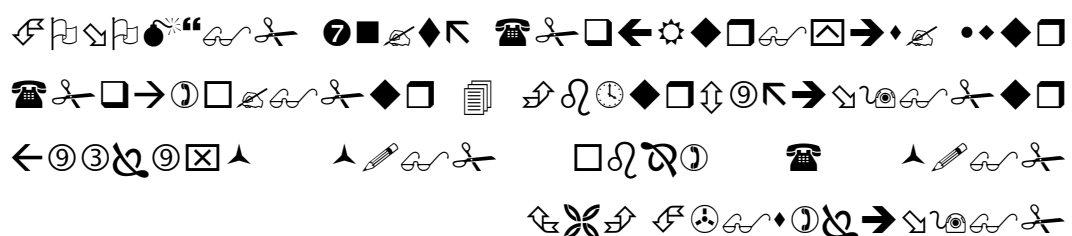
Selain pertimbangan di atas, hal yang menjadi landasan hukum tentang penerbitan kartu kredit syariah adalah Firman Allah SWT:



 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."²²

Islam mengajarkan kepada hambanya untuk memenuhi janji (akad).

Dalam kartu kredit terdapat beberapa akad yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu pihak penerbit kartu dan pemegang kartu.



 Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa

²¹ www.lontar.ui.ac.id./file?file=digital/131002...penerapan%20kartu

²² Al-Maidah (5):1

*dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*²³

Ayat di atas merupakan poin penting yang menjadi landasan dalam penerbitan kartu kredit syariah menurut fatwa MUI, dimana dalam penerbitan kartu kredit syariah yaitu adanya prinsip tolong-menolong sesama umat muslim dari dampak riba yang ada dalam kartu kredit syariah, demi menciptakan kemaslahatan bersama.

3. Macam-macam Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama *financial*. Kartu kredit ini terjadi menjadi dua yaitu kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*charge card*) dan kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (*revolving credit card*). Dalam hal ini hanya akan dijelaskan mengenai jenis yang bisa diperbaharui.

Jenis kartu ini termasuk yang populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya yang sisanya diberikan dengan cara ditunda dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya.²⁴

Jika terjadi keterlambatan dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo, maka penerbit diperbolehkan mengenakan *ta'widh* atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh

²³ Al-Maidah (5):2

²⁴ *Ibid.*

penerbit kartu pada si pemegang kartu. Begitu pula dengan pengenaan denda karena keterlambatan pembayaran (*late charge*) yang akan diakui sebagai dana social dan bukan menjadi hak bank. Ketentuan *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap kecuali untuk *merchant fee*.²⁵

4. Pihak Yang Terkait Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Transaksi yang digunakan dalam menggunakan kartu kredit melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk satu sistem kerja kartu kredit itu sendiri.

- a. Bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pengelola kartu (*mushdir al-bithaqah/issure*). Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari departemen keuangan, dan pada Bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- b. Penjual (*tajir atau qabil al-bithaqah/merchant*), yaitu pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu tersebut. Sebagai tempat belanja, seperti hotel, supermarket, restourant dan tempat-tempat lainnya di mana bank mengikat perjanjian.

²⁵ Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.248

- c. Pemegang kartu (*hamil al-bithaqah/card holder*), yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.
- d. Pengelola (*acquirer*), yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu, melakukan pembayaran kepada pihak *merchant*.²⁶

5. Akad yang Digunakan Dalam Kartu Kredit Syariah

akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah:

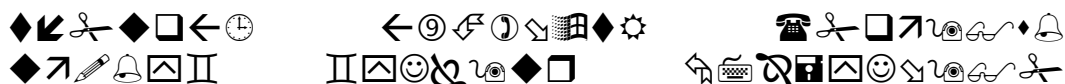
a. *Al-Kafalah*

1) Pengertian *al-kafalah*

Kafalah merupakan perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*).²⁷

2) Dasar Hukum *Kafalah*

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Quran pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf sebagai berikut:



²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 380

²⁷ Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.236



artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (qs. yusuf:72).²⁸

3) Rukun kafalah

- a) Pelaku, terdiri atas pihak penjamin pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang.
- b) Objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan.
- c) Ijab Kabul/serah terima

b. Al-Qardh

1) Pengertian *al-qardh*

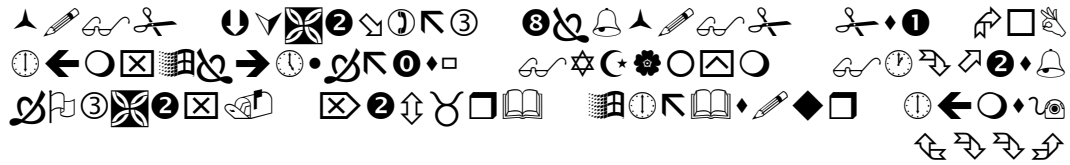
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁹

2) Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan ijma' ulama. Sungguhpun demikian, Allah swt mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "Agama Allah". Al-Hadid ayat 11.

²⁸ Yusuf (12): 72

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: mumtaz Cendikia Press, 2005), h.97



Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Qs.Al hadid :11)³⁰

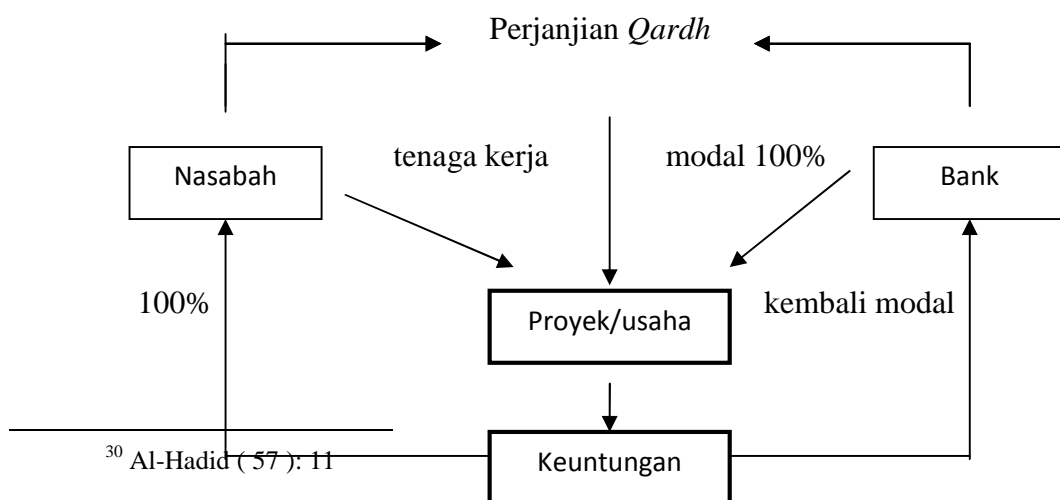
3) Rukun *al-qardh*

Seperti halnya dengan akad-akad yang lain, *qardh* memiliki rukun-rukun utama antara lain:

- Pihak yang meminjam (*muqtarid*)
- Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)
- dana (*qardh*)
- Ijab dan qabul (*sighat*).³¹

Secara umum, aplikasi perbankan dari *Qard* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema *Qardh*



³⁰ Al-Hadid (57): 11

³¹ Bambang Rianto rustam, *op.cit*, h.98.

Gambar skema qardh di atas menjelaskan bahwa bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang berbentuk kartu kredit dan dari kartu kredit ini nasabah bisa menggunakan jasa, jadi dari jasa pinjaman kartu kredit ini nasabah dikenakan administrasi atas jasa yang telah digunakannya.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.³²

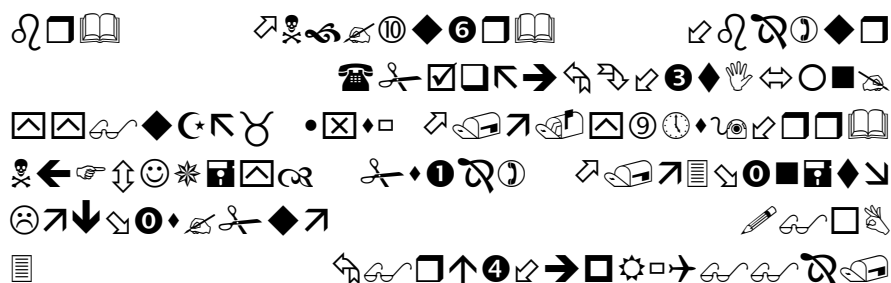
c. *Ijarah*

1) Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³³

2) Landasan Syariah

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 233



³² Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), ed.2, h. 75

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet., h.117



Artinya : dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁴

3) Rukun Ijarah

Rukun *ijarah* ada tiga macam, yaitu

- a) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor
/mu'jjirdanpenyewa/ pengguna jasa/lessee/musta'jir.
- b) Objek akad *ijarah* berupa: manfaat asset/*ma'jur* dan
pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- c) Ijab Kabul/serah terima.³⁵

Secara luas *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

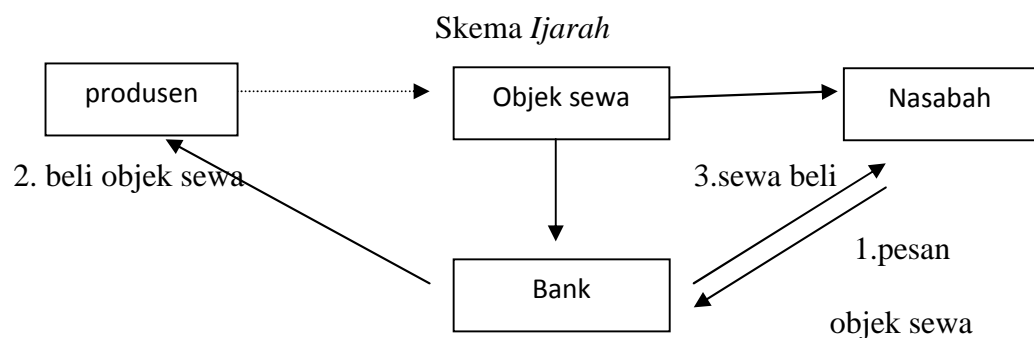
1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
asset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah
atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas asset itu sendiri.

³⁴ Al- baqarah (5):233

³⁵ Sri nurhayati dan Wasilah, *op.cit.*, h.210

2. *Ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) merupakan ijarah dengan *wa'ad* (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu.³⁶

Secara umum, aplikasi perbankan dari *ijarah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Skema diatas menjelaskan bahwa posisi bank syariah adalah sebagai perantara antara nasabah dengan penjual, disini bank syariah memiliki objek sewa, yang mana objek sewa tersebut diberikan kepada nasabah yang berbnetuk kartu kredit. Jadi dari kartu kredit ini nasabah bisa mengambil jasa. Ketika nasabah ingin membeli barang kepada penjual dan tidak ingin menggunakan uang tunai atau tidak memiliki uang tunai nasabah bisa menggunakan kartu kredit dari bank.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.³⁷

6. Fatwa MUI tentang Kartu Kredit Syariah

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.*,h.119

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi pada kalangan yang berlaku bisnis bank syariah, DSN-MUI telah menfatwakan bahwa penggunaan kartu kredit diperbolehkan pada bank syariah dengan memperhatikan tata aturan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Hal ini didasari atas alasan, yang salah satunya, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi serta memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap kepemilikan uang.³⁸

a. Ketentuan Umum tentang Syariah Card

Dalam fatwa ini yang dimaksud adalah:

- 1) *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- 2) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir **a** adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*), penerima kartu (*merchant, taji atau qabil al-bhitaqah*)
- 3) *Membershif fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- 4) *Merchant fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsil al-dayn*)

³⁸<http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/117-54dsn-muix2006-syariah-card->

- 5) *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- 6) *Ta'wid* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 7) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.³⁹

b. Dasar Hukum

Berdasarkan **fatwa No. 54/DSN-MUI /X/2006 dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 9/183/DPbs/2007.**

Penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan (halal) asal memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan. Jika menyalahi ketentuan tersebut, hukumnya akan menjadi tidak boleh (haram).

c. Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah:

- 1) *Kafalah*; dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).

³⁹ *Ibid.*

- 2) *Qard*; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- 3) *Ijarah*; dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.⁴⁰

d. Ketentuan Tentang Batasan (*Dhawabith Wa Hudud*) Syariah Card

- 1) tidak menimbulkan riba
- 2) tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya.
- 5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.⁴¹

e. Ketentuan Fee

- 1) Iuran keanggotaan (*memberhip fee*)

Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

- 2) *Merchant fee*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsara*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*)

3) *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-muqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4) *Fee kafalah*

Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah

5) Semua bentuk fee tersebut diatas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.⁴²

f. Ketentuan Ta'wid Dan Denda

1) Ta'widh

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta,widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbitkan kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

2) Denda keterlambatan (*late Charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁴³

⁴² *Ibid.*

g. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁴

C. Manajemen Risiko dalam Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan ini. Cakupan manajemen risiko meliputi tiga hal utama yaitu Identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko.⁴⁵

Secara garis besar, risiko dapat dikategorikan kedalam risiko murni dan risiko spekulatif:

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ http://images.fathfamily.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SrdlKgoKCIwAAjAxfw1/Manajemen_Risiko_dalam_Perspektif_Islam.pdf?key=fathfamily:journal:1&nmid=2832972

1. Risiko murni merupakan risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh risiko jenis ini adalah kecelakaan, kebakaran, dan banjir.
2. Risiko spekulatif adalah dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan tetap ada dalam usaha bisnis. Kita selalu mengharapkan keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan pihak tertentu tetapi akan menguntungkan pihak lainnya. Meskipun secara total masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif tersebut.⁴⁶

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan ini akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

⁴⁶ *Ibid.*

Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al-quran:

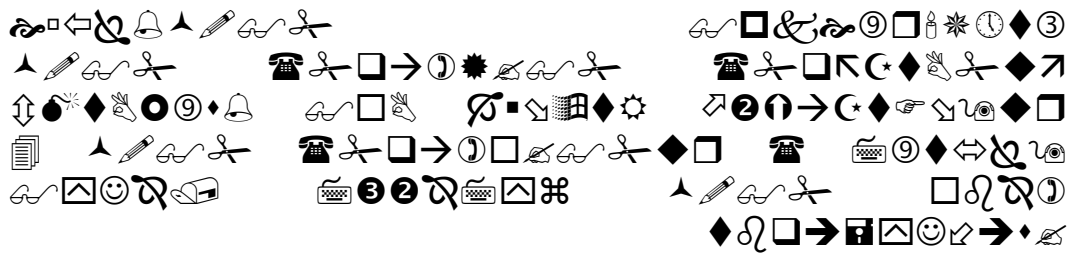


Artnya : Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (Qs. Yusuf:⁴⁷

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh yusuf maka kemudian yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

⁴⁷ Yusuf (12): 47.

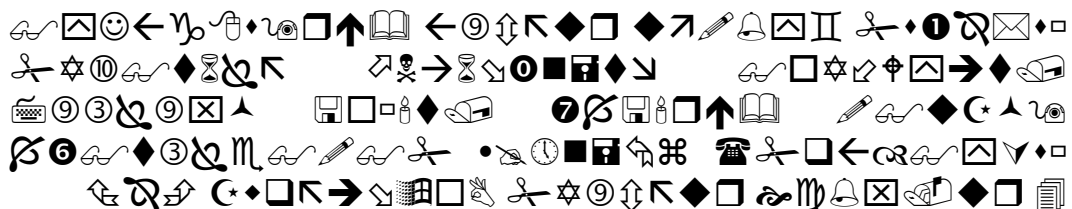
Secara umum, substansi landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Firman Allah:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁸

Hal ini berarti manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.

Setelah melakukan langka manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan dilakukan dengan sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap atau bertawakal seperti dalam firman_Nya:



⁴⁸ Al-Hasyr (59): 18

Artinya: Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana. (Qs. Al-Israa' :5).⁴⁹

⁴⁹ Al-Israa' (17):5

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO KARTU KREDIT SYARIAH PADA

PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU

DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Mekanisme Kartu Kredit Syaiah Pada PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi.¹ Walupun persyaratan yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan kartu kredit di setiap bank yang mengeluarkannya ada perbedaan, Akan tetapi, secara umum ada beberapa syarat yang diperkirakan sama. Biasanya calon nasabah hanya perlu mengisi aplikasi yang telah disediakan oleh bank penerbit. Pada umumnya persyaratan tersebut berupa:

1. Cukup siapkan kartu tanda penduduk (KTP) yang alamatnya sesuai dengan alamat tempat tinggal anda, dan kalau bisa ada nomor telpon tetap (*fixed line*) di rumah tersebut.
2. Siapkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk proses verifikasi dan wawancara.
3. Siapkan daftar gaji atau keterangan penghasilan, jika wiraswasta.
4. Siapkan orang terdekat anda (kakak, adik atau saudara) nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
5. Datang ke bank yang anda percaya.
6. Usahakan anda selalu bisa dihubungi.

¹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet.Ke-2, h.895

Sedangkan pemberian kredit di PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan menjadi pemegang kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru
2. Nasabah mengisi aplikasi yang telah disediakan oleh PT. BNI Syariah cabang pekanbaru
 - a. Untuk karyawan
 - 1) Fotokopi KTP / Paspor
 - 2) Bukti penghasilan asli
 - 3) Bila limit kartu Rp.50 juta atau lebih akan diperlukan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - b. Untuk pengusaha
 - 1) Fotokopi KTP / Paspor
 - 2) Bukti penghasilan asli
 - 3) Fotokopi akte pendirian surat izin usaha perorangan/(SIUP) / TDP
 - 4) Fotokopi rekening Koran 3 bulan terakhir / surat pembukuan tabungan (SPT)
 - 5) Bila limit kartu Rp.50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP
 - c. Untuk professional
 - 1) Fotokopi KTP / Paspor
 - 2) Bukti penghasilan asli
 - 3) Surat izin profesi
 - 4) Fotokopi tabungan atau/SPT
 - 5) Bila limit kartu Rp.50 atau lebih maka diperlukan NPWP

- d. Untuk pemegang kartu tambahan
 - 1) Fotokopi KTP / Paspor
 - 2) Fotokopi kartu keluarga
 - 3) Bila limit kartu Rp.50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP.
3. Kartu tambahan diterbitkan atas permintaan dan menjadi tanggung jawab kartu utama dan dikenakan peraturan yang sama
4. Untuk setiap penerbitan kartu baik kartu utama maupun kartu tambahan, pemegang kartu wajib membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh bank.²

Kartu kredit yang diterbitkan oleh PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru tidak menggunakan anggunan atau kartu kredit tanpa jaminan. Sehingga jika ada kartu kredit yang bermasalah atau macet, jalan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan cara terus mendatangi pihak yang bersangkutan sampai ia bisa melunasi semua tagihan kartu kredit. Inilah pekerjaan yang paling merepotkan yang dialami oleh karyawan PT. BNI syariah cabang Pekanbaru.

B. Penerapan Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru

PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru melalui produk *hasanah card* semakin punya nyali mengembangkan bisnis kartu pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang mengajukan kartu kredit pembiayaan PT. BNI Syariah hingga September 2011 mencapai 3132 orang, meningkat dibandingkan

² Brosur Formulir Aplikasi BNI Hasanah Card

akhir 2010 sebanyak. 2430 orang. Kinerja 9 bulan tersebut hampir menyamai dengan volume penjualan Hasanah Card pada tahun 2010.³

General Manager BNI Syariah Pusat Iwa Kustiwa mengatakan besaran pembiayaan bermasalah (*non performing/NPF*) hingga Mei sekitar 4%, turun sekitar 1% dibandingkan dengan akhir 2010. NPF terjadi karena ada nasabah yang di PHK dari pekerjaannya dan nasabah yang tidak bisa membayar tepat waktu kartu kreditnya.⁴

Pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru terdapat risiko pada pemberian kartu kredit. Risiko yang paling besar adalah risiko macet dan risiko ketidaktertiban dalam pembayaran. Risiko macet besar ini disebabkan nasabah tidak dapat membayar atas tagihan kartu kreditnya yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan sedangkan risiko yang lain adalah ketertiban dalam membayar tagihan di saat jatuh tempo, hal ini sangat merepotkan pihak bank meskipun pada akhirnya tagihan tersebut dapat ditagih nantinya.

Risiko lain juga muncul dari ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

Kartu kredit yang bermasalah atau macet ini biasanya disebabkan oleh:

1. pemilik kartu kredit pindah tugas
2. dipecat dari tempat kerjanya
3. tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar

³ Riya, (Administrasi *Hasanah Card*), karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Wawancara, Tanggal 05 Oktober 2011 di Pekanbaru.

⁴ Web: <http://www.bisnis.com/finansial/perbankan/27089-hasanah-card-tumbuh-40>

4. tidak ingin membayar
5. karena malas atau mengulur-ngulur waktu dalam membayar tagihan
6. Pemilik kartu kredit meninggal dunia.⁵

Kartu kredit yang bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian kartu kredit. Penyelesaian kartu kredit yang bermasalah dilakukan dengan beberapa tindakan seperti, menelpon nasabah yang bersangkutan, memberi surat peringatan pertama, apabila surat pertama tidak ditanggapi maka bank akan mengirim peringatan yang kedua, ketiga dengan cara mendatangi tempat kerja.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kredit pada kartu hasanah, PT.BNI syariah Cabang Pekanbaru mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) terhadap nasabah tersebut. Adapun denda keterlambatan pada kartu hasanah telah ditetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*. Tujuannya adalah untuk menghitung *equivalent* biaya riil yang dibebankan kepada pemegang kartu hasanah yang disebut dengan *net monthly fee*. Di mana semua limit kartu diperbandingkan dengan *monthly fee* masing-masing limit kartu mempunyai *equivalent* yang sama yaitu sebesar 2,95%. Biaya riil yang dikenakan kepada *card holder* yang disebut dengan *net monthly fee*:

⁵ Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Wawancara, Tanggal 12 Juli 2011 di Pekanbaru.

$$\text{Net Monthly Fee} = \text{Outstanding (sisa hutang yang belum dilunasi)} \times (\text{Monthly fee} : \text{Limit Kartu}).$$

Contoh kasus

Limit kartu Gold Rp.10 Juta, di mana *monthly fee* nya Rp 295.000,-.

Tanggal 1 juli melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1juta, dimana ditagih pada tanggal 18 Juli dan jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2010, dimana pada tanggal 5 Agustus 2010 melakukan pembayaran sebesar Rp 500 Ribu, maka *outstanding* (sisa hutang yang belum dibayar) adalah Rp 500.000,-.

$\text{Net monthly fee} = \text{outstanding} \times (\text{monthly fee} / \text{limit kartu})$

$\text{Rp } 500.000,- \times (\text{Rp } 295.000,- / \text{Rp } 10.000.000,-)$

$\text{Net monthly fee} = \text{Rp } 14.750$, jadi biaya keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 14.750,-.⁶

Biaya keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah tersebut bukan dijadikan sebagai hasil pendapatan bank tetapi dikirim kedinas sosial.⁷

Untuk mengantisipasi risiko pada kartu kredit, maka PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru melakukan beberapa antisipasi:

1. Pihak bank harus benar-benar mengadakan seleksi kepada calon nasabah kartu kredit sebelum pihak bank mencairkan plafon kartu kredit yang diajukan nasabah.

⁶ <http://kartuhasanah.blogspot.com/>

⁷ Edi Putraga, (Unit Pemasaran Dana), Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Wawancara, Tanggal 12 Juli 2011 di Pekanbaru

2. Melihat calon nasabah kartu kredit itu tergolong nasabah yang pernah melakukan kartu kredit macet sebelumnya.
3. Melakukan sistem informasi debitur, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah ini pernah mempunyai kredit macet di bank-bank lain.
4. Melihat kepribadian dari calon nasabah.⁸

Penerapan manajemen yang dilakukan oleh PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru untuk mengantisipasi risiko pada kartu kredit syariah saat ini sudah baik. Ini dapat dilihat dari penurunan kartu kredit syariah yang bermasalah. Karena kartu kredit syariah pada PT.BNI syariah cabang pekanbaru produk yang masih baru, sehingga belum pernah ada penyelesaian kartu kredit yang bermasalah lewat jalur hukum atau persidangan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru ini, haruslah berjalan secara bersamaan karena bila ada salah satu yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah maka pihak bank tidak bisa mencairkan atau menerbitkan kartu kreditnya. Hal ini dilakukan supaya bisa terhindar dari kartu kredit yang bermasalah dan bank harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit.

C. Pandangan Islam terhadap Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah melibatkan beberapa aturan dan pelaksanaan. Aturan yang sudah terbentuk sedemikian rupa

⁸ *Ibid.*

akan diuraikan dalam pelaksanaan, artinya apakah aturan yang telah disusun terlaksana dengan baik.⁹

Ekonomi Islam, menurut Masudul Alam Choudury sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum yang dihadapi umat Islam.¹⁰

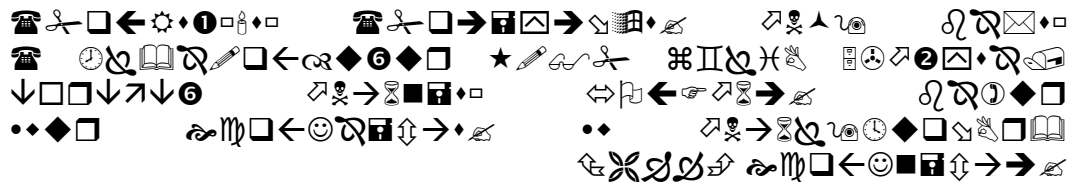
Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Bahwa usaha untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.¹¹

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pengembalian tagihan kartu kredit syariah yang tertunda atau terlambat dalam pembayaran, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda. Sebagaimana diketahui utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan adalah haram dan tidak dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 279:

⁹ [Htt://id. Wikiedia. Org/ Wiki/hukum](http://id.wikiedia.org/wiki/hukum)

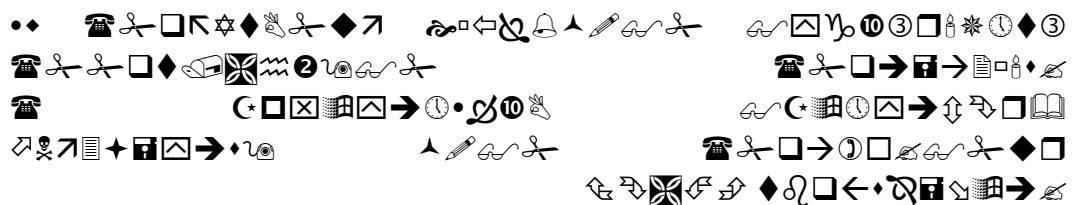
¹⁰ Muhammad, *Visis al-Quran Tantang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Cet. Ke-1, h. 299

¹¹ *Ibid*



Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹²

Selanjutnya, dalam surat Ali Imran Ayat 130:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹³

Sebelum melakukan pencairan terhadap kartu kredit atau pembiayaan harus melakukan analisa, analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali digunakan analisa 5C, yakni:

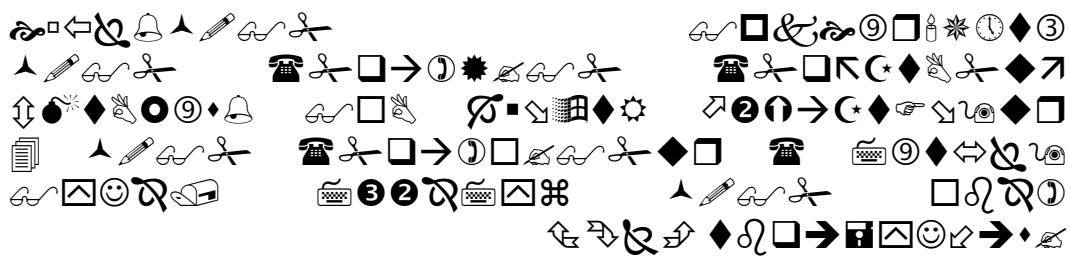
1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
3. *Capital* artinya modal yang diperlukan pinjaman
4. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

¹² Al-Baqarah (2):279

¹³ Ali Imran (3): 130

5. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank

Dengan analisa tersebut, maka dapat dilakukan suatu proses manajemen risiko melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko. Sesuai dengan firman Allah SWT. Juga menjelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁴

Nasabah yang memiliki kartu kredit, bisa dikatakan masyarakat yang ekonominya menengah keatas, karena di dalam mengajukan permohonan kartu kredit salah satu syaratnya adalah memberikan fotocopy slip gaji yang diterima setiap bulannya, walaupun ada keterlambatan dalam melunasi tagihan kartu kredit, itu karena kelalaian dari nasabah dan adanya itikad yang kurang baik dari nasabah itu sendiri, sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan bagi orang kaya (mampu) yang mampu membayar hutangnnya tetapi ia sengaja mengulur-ngulur untuk melunasi utangnya. Rasulullah Saw memperingatkan:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُوفِيَهُ إِلَّا هَلْ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقٌ

¹⁴ Al Hasyr (59):18

Artinya: Siapa saja yang mengambil suatu utang sedang ia sengaja untuk tidak membayarnya kepada yang memberikan pinjaman, niscaya ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri (H.R. Ibnu Majjah dan Baihaqi).¹⁵

Di antara keadilan yang diwajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, demi melepaskan beban tanggungan, menunaikan hak komitmen dengan akad dan menepati janji. Jika ia mengulur-ngulur dalam pembayaran hutang padahal sebenarnya ia mampu maka ia dzalim dan berhak dan mendapatkan siksaan sebagaimana orang-orang yang dzalim didunia dan akhirat¹⁶. Tentang sanksi yang akan dikenakan didunia, rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda, penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu (kaya) hendaklah ia menerimanya. (Muttafaq Alaih)¹⁷

Lain halnya terlambat membayar hutang karena tidak mampu. Dalam Islam, orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan maka ia tidak didenda. Allah SWT berfirman dalam surat al-baqarah (2) ayat 280 yang berbunyi:

¹⁵ Mahrus Ali, *Terjemahan lengkap Hadist Bulughul maram*, (Bandung: PT. Al Ma’rif: Cet.ke-V, h.147

¹⁶ Yusuf qardawi, *Peran nilai dan Moral*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), Cet. Ke-1, h.317

¹⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jild 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), Cet. Ke-1, h. 465



*Artinya:” Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.*¹⁸

Allah SWT menyuruh bersabar dalam menghadapi orang yang kesulitan dan tidak dapat membayar. Tidak seperti orang jahiliyah yang mengatakan kepada peminjaman “bila jatuh tempo, dibayar atau ditambahkan pada bunganya”. Kemudian Allah SWT menganjurkan untuk menghapusnya saja. Dan diapun menjanjikan kepadanya, bila berbuat demikian, kebaikan dan pahala yang banyak. Allah SWT berfirman “ *dan menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*”. Maksudnya, jika kamu tidak mengambil pokok pinjaman secara keseluruhan dan membebaskan sipeminjam dari kewajibannya membayar hutang, maka hal itu lebih baik bagimu¹⁹

Dengan kata lain, penerbitan kartu kredit memberikan pinjaman uang kepada nasabah untuk digunakan oleh penggunanya membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang, selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan system riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Yang menjadi landasan hukum penerbitan kartu kredit syariah ini adalah firman Allah:

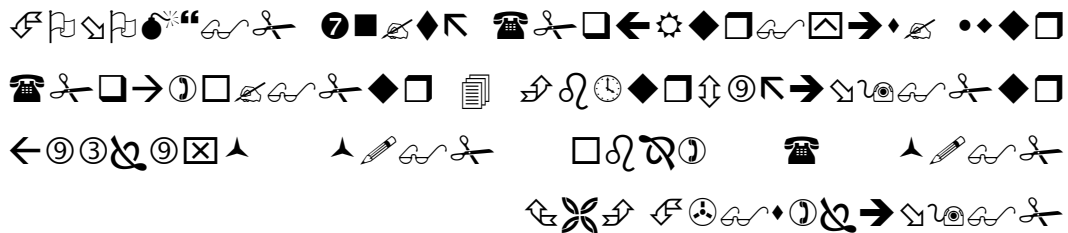
¹⁸ Al-Baqarah (2): 280

¹⁹ Muhammad Nasib Arrifa'I, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid 5, Cet.Ke-2, h.459



Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akaq-akaq itu...

Selanjutnya Al-Maidah ayat 2:



Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Qs.Al-Maidah:2)

Islam adalah agama yang sangat mulia, mengajarkan toleransi, ukhwh dan hak-hak persaudaraan. Allah SWT menyuruh memberi tangguh bagi orang-orang tidak mampu membayar hutang. Ini merupakan suatu sikap toleransi yang Allah SWT anjurkan kepada manusia. Toleransi dan tolong menolong merupakan dasar yang harus diterapkan bagi kesejahteraan hidup manusia.

Dalam ekonomi Islam, ada prinsip yang harus dipegang teguh. Di antara prinsip itu adalah keadilan. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Maka prinsip ekonomi Islam harus

diterapkan dalam kehidupan sehingga tercapai tujuan akhir dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Denda adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan atau penunggakan pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dhain* (harga hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.²⁰

Dalam pandangan Islam denda sama dengan dengan riba. Kata riba berasal dari bahasa arab yaitu *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan) yang dimaksud disini adalah tambahan dari modal atau yang dipinjamkan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hajj ayat 5



Artnya: Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua masing-masing adalah riba utang piutang dan jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi riba fadhl dan riba nasiyah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Riba jahilyah adalah utang

²⁰ Gufran.A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jkarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.159

dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam sejenis ribawi, Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukaran dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²¹

Karena denda yang ada pada kredit adalah bagian dari riba, maka kedudukan hukumnya sama halnya dengan riba. Bila ditinjau dari segi pengertiannya denda disebut juga dengan riba nasiah. Riba nasiah yaitu:

Wahbah al-Zuhaily yang dikutip oleh Putri Ikamala Sari mendefinisi riba al-nasiah adalah: penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan ‘ain (barang kontan) atas dain (harga utang)” terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau ditimbang” .²²

Menurut Abdur Rahman al-Zajairy yang dikutip oleh Ika Mala Sari Riba al-nasiah adalah riba atau tambahahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran” .²³

²¹ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet.1, h.41

²² Putri Ikamala Sari, *Sanksi Jatuh tempo Kredit di PT. Menara Dana Sejahtera Pekanbaru di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*. Muamalah, 2004. h. 57

²³ *Ibid*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan dua macam kasus riba nasiah. Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa denda merupakan sisa-sisa dari riba, adapun kedudukan hukumnya sama halnya dengan kedudukan riba.

Adapun pandangan mujtahid Islam terhadap denda jatuh tempo kredit adalah seperti yang terlihat dalam pendapat berikut:

Didalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* yang dikutip Putri Ikamala Sari, seseorang menanyakan “apakah boleh menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran, khususnya bagi orang-orang yang mengulur-ngulur pembayaran kredit? Dijawab oleh Yusuf Qardhawi: dalam menetapkan denda atas keterlambatan orang yang mengulur-ngulur pembayaran kredit cukup beralasan benar. Hal ini karena denda tersebut sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang. Adapun perbedaannya adalah bahwa bunga terikat dengan jumlah uang yang diambil dan waktu keterlambatan. Sedangkan, dalam pertanyaan di atas, jumlah denda ditetapkan tanpa terikat dengan kredit dan waktu keterlambatan.”²⁴

Pada PT. BNI Syariah cabang pekanbaru dalam mengatasi terlambatnya nasabah kartu kredit membayar kredit, maka PT. BNI syariah cabang pekanbaru mengenakan denda atas keterlambatannya itu

²⁴ *Ibid.*, 58

Sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-mengulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dengan catatan menganggap benda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khattabah dari mazhab Maliki.²⁵

Dari uraian di atas terlihat bahwa manajemen risiko kartu kredit syariah cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006.

²⁵ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Untuk mendapatkan kartu kredit di PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru debitur harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh bank dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
2. Risiko kartu kredit yang ada di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah risiko gagal bayar dan risiko ketidaktertiban dalam membayar tagihan saat jatuh tempo. Jadi, untuk mengatasi kartu kredit yang bermasalah, pihak bank akan menelpon pihak yang bersangkutan atau mengirim surat peringatan kepada nasabah, jika surat-surat tidak ditanggapi maka pihak bank akan mendatangi pihak yang bersangkutan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran kartu kredit oleh nasabah, PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru mengenakan denda kepada nasabah tersebut sesuai dengan Fatwa yang berlaku.
3. Pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu kredit syariah pada PT. BNI syariah cabang pekanbaru adalah tidak bertentangan dengan Islam, karena pihak bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai

sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006.

B. Saran

1. Jika masyarakat yang ingin menggunakan kartu kredit hendaklah sesuai dengan prosedur dan ketentuan syariat Islam dan bagi masyarakat yang mempunyai kartu kredit hendaklah membayar tagihannya tepat pada waktunya yang telah ditetapkan oleh bank atau pihak yang menerbitkan kartu kredit. Bagi orang yang berhutang juga harus tahu bahwa membayar hutang adalah satu kewajiban bagi yang berhutang.
2. Bagi PT. BNI syariah cabang pekanbaru hendaklah dalam memberikan kartu kredit kepada masyarakat hendaklah sesuai dengan syariat Islam. Apabila nasabah terlambat dalam membayar tagihannya hendaklah terlebih dahulu memberikan teguran sesuai dengan Islam. Tetapi jika tidak mengindahkan teguran tersebut maka pihak bank boleh mengambil tindakan yang lain yaitu: melanjutkan kejalur hukum

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Mas'Adi, Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ali, Mahrus. Ust, *Terjemahan lengkap Hadist Bulughul maram*, (Bandung : PT. Al Ma'rif).
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Muamalah Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2005).
- Aziz, Abdul, Ulfah, Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2010).
- Billah, M Ma'sum, *Principle and Praciple of Takaful and Insurance*, (Malaysia : International Islami University, 2001).
- Bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, Muhammad, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jild 2*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2007).
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Djojosoedarso, Soesisono, *Prisip-Prisip manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : Salemba Empat, 1999).
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta : Panji masyarkat, 1991).
- [http/ www.google.co.id/ infooperbankan dan ekonomi syariah](http://www.google.co.id/infooperbankan%20dan%20ekonomi%20syariah).
- [http/www.bni.co.id/Syariah/BNIHasanahCard/tabid/376/Depault.aspx](http://www.bni.co.id/Syariah/BNIHasanahCard/tabid/376/Depault.aspx)
- <http://ahlussunnah.info/blog/2010/07/08/artikel-ke-75-kartu-kredit>.
- [http://kartu hasanah.blogspot.com](http://kartu%20hasanah.blogspot.com)
- <http://luqmannomic.wordpress.com/2008/12/21/kartu-kredit-syariahkah/>
- Ibrahim Abu Sulaiman, Abdul Wahab, Prof. Dr. *Banking Cards Syariah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

- Idroes , Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008).
- Ika malasari, putrid, *Sanksi/Denda Jatuh Tempo Kredit Pada PT. Menara Dana Sejahtera cabang Pekanbaru di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalah, 2004.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mansur, Husaini dan Gunawan Idat, Dhani. *Dimensi Perbankan Dalam al Quran*, (Jakarta : PT. Visi Cita Kreasi, 2007).
- Muhammad, *Visis al-Quran Tantang Etika dan Bisnis*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002).
- Nasib Arrifa'I, Muhammad, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, 1999.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008).
- Qardawi, Yusuf, *Peran nilai dan Moral*, (Jakarta : Robbani Press, 2002).
- Rianto Rustam, Bambang, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Mumtaz Cendikia Press, 2005).
- Rivai, Veithzal,. *Bank and Financial Institution Management "Conventional and Sharia System*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Salim, H.Abas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005).
- Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1997).
- Soehadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, (Yogyakarta : Lukman offset, 1999).
- Soemitra, Andri, *Bank dan lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2009).

Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah, Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekononisia, 2007).

Suprayogo, Imam dan Tobroni,. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003).

Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).

Taswan, *Manajmen Perbankan Konsep, Tekni dan Aplikasi*, (Yoyakarta : UPP STIM YKPN, 2006).

Zaki Badwi, Ahmad, *Kamus Ekonomi Arab*, (Yogyakarta : Pustaka Wdyatama, 2006).